

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapat per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan demikian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus-menerus.

Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari pembangunan sosial. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi akan memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu

dalam menciptakan Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa. Salah satu upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa tersebut. Dalam PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Des adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUMDes dan BUM Desa bersama. PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa Denai Lama. Pembangunan ekonomi lokal ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong

terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. BUMDes merupakan instrumen otonomi desa yang bertujuan untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pasal 3 bertujuan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat Desa, Karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa.

Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di kantor Desa Denai Lama yang berada di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang di beri nama “Sastro3 16” . BUMDes Sastro 3 16 didirikan pada 16 Februari 2016. Pendirian BUMDes ini berdasarkan hasil musyawarah Desa No. 14/05/ST/VIII/Tahun 2016. Desa Denai Lama mempunyai program di bidang sektor pertanian, sektor objek wisata dan seni budaya. Program BUMDes di desa Denai Lama beroperasi sejak tahun 2016, program Badan Usaha Milik Desa Denai Lama dimulai dari kelompok tani. Hal ini dilakukan karena sebagian besar mata pencaharian di desa tersebut adalah bertani. Jadi dalam hal ini pemerintah desa melakukan program ini berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jenis usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Denai Lama ini adalah peningkatan hasil pertanian khususnya di gabah padi. Dimana pemerintah desa melakukan program gabah padi supaya harga gabah padi di desa tersebut tetap stabil. BUMDes juga menyediakan modal dasar kepada masyarakat yang mengikuti program BUMDes agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya serta memenuhi kebutuhannya dalam melakukan

kegiatan bertani. Mekanisme program pinjam modal usaha ini dilakukan tiap awal musim tanam. Pemerintah desa Denai Lama membuka forum pendaftaran anggota untuk pinjam modal usaha pengelolaan pertanaman padi yang meliputi data pribadi, luas lahan dan jumlah modal yang akan dipinjam. Kemudian diadakan pertemuan umum yang menjelaskan point- point perjanjian antara petani dan BUMDes. Di Desa Denai lama juga terdapat Desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan sarana dan prasarannya bersumber dari Dana Desa dan partisipasi BUMDes yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Agrowisata Paloh Naga di Deli Serdang merupakan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tariknya. Berada di lokasi ini Anda akan mendapatkan suguhan dari hijaunya petak-petak sawah yang membentang seluas mata memandang. Area persawahan yang luas, jadi atraksi utama yang langsung mampu menarik minat banyak pengunjung. Berfoto dengan latar belakang sawah hijau yang menyegarkan, berpadu dengan birunya langit, sungguh sangat instagenic. Pengelola menyediakan jembatan bambu sengaja dibangun untuk menjadi spot tracking sekaligus selfie. Di Desa Denai Lama juga dibentuk Sanggar Tari Lingkaran yang merupakan media belajar bagi para wisatawan untuk belajar tarian melayu, seperti Serampang Dua Belas dan Kuala Deli. Wisatawan juga dapat belajar bermain alat musik melayu seperti Arkodion, Gambus dan Marwas. Desa Denai Lama juga menyediakan oleh-oleh khas dari Desa tersebut yang dibuat langsung oleh masyarakat yang berbahan dasar melinjo seperti dodol melinjo, bolu melinjo dan minuman khas berbahan dasar melinjo yang oleh masyarakat lokal dinamakan sebagai kopi melinjo.

Berawal dari keinginan untuk mengembangkan dan memperkenalkan Paloh Naga, menjadi alasan hadirnya Agrowisata Paloh Naga saat ini. Indah nya pemandangan area persawahan yang luas dan hijau menjadi salah satu spot wisata yang ditawarkan tempat wisata yang berada di Desa Denai Lama, Pantai Labu, Deli serdang, Sumatera Utara. Motivasi Bumdes untuk membuat dan mengelola wisata alam ini di karenakan Desa Denai Lama pernah mengikuti Festival Garapan Tradisional Deli Serdang, lalu mendapatkan juara pertama saat membawa nama Paloh Naga tersebut oleh karena itu Desa Denai Lama ingin mengembangkan dan mengangkat sejarah dari Paloh Naga sendiri untuk dikenal orang lebih banyak lagi. Namun di dalam pengelolaan objek wisata di Desa Denai Lama masih terdapat berbagai kendala atau hambatan yaitu permodalan yang mengakibatkan masih banyak potensi di Desa Denai Lama yang belum dikembangkan.

Dari Latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada :

### **1. Peneliti**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

### **2. Pemerintah Desa**

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Desa khususnya dalam hal Pengembangan



Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Akademis

Dapat menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang  
Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengembangan Potensi Ekonomi**

##### **2.1.1 Pengertian Pengembangan Potensi Ekonomi**

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan masyarakat, proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Potensi dalam kegiatan bidang ekonomi memiliki arti yaitu sesuatu yang dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatannya nilainya. Menggali nilai pendapatan sumber daya alam, pendapatan ini lebih terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dalam bentuk ekonomi. Untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk ekonomi atau kegiatan yang dapat menggali dan meningkatkan potensi tersebut. Memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kegiatan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian.

Pengembangan Potensi ekonomi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Apabila sumber daya alam di desa tersebut tidak mendukung atau bisa dikatakan lahan pertanian gersang, sumber mata air susah didapatkan dan akses transportasi sulit maka pengembangan ekonomi desa menjadi sulit. Sebenarnya hal tersebut bisa teratasi jika sumber daya manusianya unggul pasti akan mencari jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Namun begitu sebaliknya jika potensi yang ada tidak dikelola secara maksimal, tentu kemampuan desa untuk berkembang masih rendah. Bayangkan saja, jika ada lahan subur yang luas dan kekayaan alam melimpah tapi belum ada dan bahkan tidak ada yang memanfaatkan. Tentu potensi alam itu terbuang percuma tanpa menghasilkan apapun. Karena itu, tingkat kemampuan desa untuk berkembang dipengaruhi oleh kedua potensi ini.

Potensi ekonomi yang dikembangkan di Desa Denai Lama memberikan nilai-nilai yang sulit diukur secara materi, seperti rasa nyaman, kegembiraan,

nilai ilmu pengetahuan, dan kelestarian alam, agrowisata juga memberikan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi ini tentu sangat erat kaitannya dengan tujuan pengelolaan agrowisata itu, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya, pemerintah daerah, dan negara pada umumnya. Berikut yang termasuk keuntungan ekonomi yaitu :

a. Keuntungan ekonomi bagi daerah masyarakat

Adanya suatu obyek agrowisata di suatu daerah setidaknya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Arus barang dan jasa yang terjadi di daerah itu akan membuka peluang terjadinya transaksi ekonomi. Selanjutnya, objek wisata itu diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Beberapa keuntungan ekonomi itu sebagai berikut:

1) Membuka lapangan pekerjaan

Berkembangnya suatu lokasi menjadi daerah agrowisata, membuka peluang tumbuhnya usaha-usaha, baik di sektor formal maupun informal. Dari sektor formal, misalnya peluang ini ada pada pekerja di agrowisata itu dan pekerja di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas bagi pengunjung, seperti penginapan. Bentuk usaha informal itu ada yang berfungsi sebagai pekerjaan utama, dan ada pula yang hanya sebagai pekerjaan tambahan contohnya yaitu pedagang kecil dan adanya jasa angkutan.

2) Meningkatkan pendapatan masyarakat

Adanya kawasan agrowisata di suatu wilayah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan dari pekerjaan

formal maupun informal. Misalnya, dengan menjual berbagai produk khas daerah maupun dengan penyediaan fasilitas bagi para wisatawan. Sektor ini akan semakin baik dan menguntungkan apabila dilakukan pengarahan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata.

3) Meningkatkan popularitas daerah

Keberadaan agrowisata di suatu daerah akan turut mengharumkan nama daerah, kalau nama daerah sudah populer akan berpengaruh terhadap produk-produk lain yang di tawarkan oleh daerah itu. Salak Bali, misalnya begitu mudah di ingat orang karena mengandung nama yang sudah sangat di kenal luas. Begitu pula dengan apel Malang, nama kota Malang sudah identik dengan nama apel.

4) Meningkatkan produksi

Penguasaan pertanian secara umum tentunya memiliki orientasi untuk memperoleh hasil produksinya. Komoditas tersebut berupa produk perkebunan, perikanan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, dan produk tertentu. Untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki kuantitas dan kualitas yang tinggi tentunya diperlukan usaha yang cukup intensif. Dengan dikembangkan daerah pertanian untuk menjadi daerah agrowisata, perlu adanya suatu pengelolaan yang baik bagi objek utama agrowisata itu. perbaikan pengelolaan ini setidaknya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi masing- masing komoditas yang di usahakan. Pengelolaan objek wisata yang berbasis masyarakat yang

dikelola oleh masyarakat lokal sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah itu sendiri seperti pertanian. Mengembangkan daerah pertanian menjadi tempat agrowisata untuk mendatangkan banyak wisatawan yang berkunjung melihat khas desa itu sendiri. Memasarkan hasil-hasil produksi yang dihasilkan dari daerah setempat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan di dukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Tujuan dari objek wisata yaitu mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Membuat suatu pembangunan wisata berkelanjutan maka dampak laju pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat dengan berlangsungnya pengelolaan pariwisata berkelanjutan wisatawan yang berkunjung jadi mengenal desa tersebut dan pendapatan ekonomi masyarakat mengalami perubahan menjadi bertambah.

## **2.2 Otonomi Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Menurut Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan,

harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

## **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai : *“Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang*



*dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.*

- a. BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang di kelolah oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.
- b. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat desa.
- c. BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

BUMDes pada dasarnya dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar.
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

### **2.3.2 Tujuan BUMDes**

Tujuan dari BUMDes adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa melalui tujuan khusus sebagaimana Pasal 3 Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 4/2015, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

### 2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yaitu :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social instution) dan komersial (commercial instution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergi antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersil bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

## 2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes, BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

## 3. Emansipatif

Semua kelompok yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mekanisme operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat

desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

#### 4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolannya.

## 5. Akuntabel

Seluruh bagian usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

## 6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut akan di capai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan

untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

#### **2.3.4 Landasan Hukum BUMDes**

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. BUMDes didirikan oleh Pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah membuat satu bab mengenai BUMDes yang selanjutnya disebut BUMDes yaitu pada Bab X pasal 87, 88, 89, 90 meliputi :

1. Pasal 87
  - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
  - b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

c. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 88

- a. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.
- b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 89

Hasil dari BUMDes dimanfaatkan untuk :

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
- b. Melakukan Pendampingan teknis dan akses ke pasar.
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.



## **2.4 Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.4.1 Pengertian kesejahteraan masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya secara baik.

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu Kesejahteraan dan Masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, santosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan adalah “hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran.

Masyarakat adalah “berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesempatan menjadi masyarakat Indonesia”. Masyarakat merupakan kumpulan beberapa individu yang berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan atau pertalian satu sama lainnya. Berdasarkan pengertian di atas maka

kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman santosa, makmur, dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Ciri-ciri pokok masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum dapat diukur dari berbagai indikator. Menurut Hermanita (2013 : 111) indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat, masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan diantaranya:

- a. Jumlah dan pemerataan pendapat

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondidi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahterannya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada

akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Sehingga kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditetapkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

- d. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu Negara. Menurut Al- Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu, masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama, yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.

#### **2.4.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

### 2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang membentuk kesejahteraan tersebut. Banyak factor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan perumahan yang mereka diami.
- b. Ada tidaknya aliran listrik dan fasilitas untuk memperoleh air bersih.
- c. Keadaan infrastruktur pada umumnya.
- d. Tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor yang penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat.

Dari berbagai faktor di atas salah satu faktor yang terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai alat pengukur kasar taraf kemakmuran yang dicapai penduduk suatu negara. Pendapat perkapita dapat digunakan untuk 3 tujuan berikut :

1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu Negara pada suatu tahun tertentu.
2. Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi dunia dan di berbagai Negara.
3. Menunjukkan jurang pembangunan di antara berbagai Negara. Tanpa mengecilkan besar sumbangan yang diberikan oleh data pendapatan perkapita, perlu juga hendaknya disadari bahwa pendapatan perkapita sebagai indikator tingkat kemakmuran dan pembangunan mempunyai

beberapa kelemahan, ketidak sempurnaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua aspek:

- a. Kelemahan yang bersumber dari ketidak sesuaian penggunaan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi.
- b. Kelemahan yang bersifat statistic dan metodologi dalam menghitung pendapatan perkapita.

Tetapi disamping itu terdapat pula beberapa faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu factor non ekonomi. Faktor non ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan sosial maupun alam sekitar. Faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.
- b. Keadaan iklim dan alam sekitar.
- c. Ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Reza M. Zulkarnaen (2016)

Penelitian Reza M. Zulkarnaen (2016) yang berjudul Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Penelitian dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya, kedua desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDes sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

2. Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S. (2018)

Penelitian Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S. (2018) yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan,

Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Peran modal 32ocal32 dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan 32ocal32 yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

3. Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto (2016)

Peneliti Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto (2016) yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban masyarakat yang akan meminjam



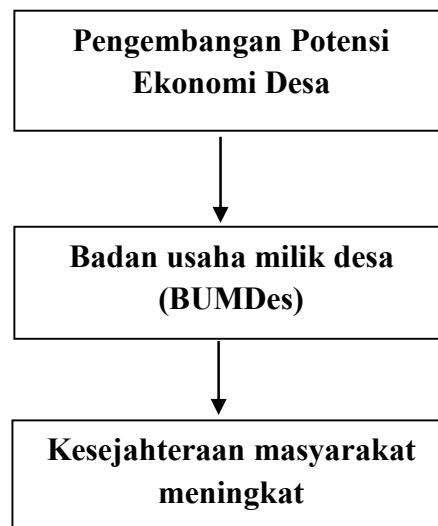
dana untuk usaha. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman di BUMDes lebih rendah daripada meminjam melalui rentenir. BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Pelatihan dan bimbingan terkait pengolahan lanjutan hasil pertanian dan pemasaran selalu dilakukan oleh BUMDes untuk menambah ketrampilan dan wawasan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian Lucita Melati Pardosi (2021) dengan judul “ Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelusuran belum ada penelitian tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian tersebut untuk mendapatkan hasil yang mutlak.

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Skema Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah pengembangan potensi ekonomi desa yang menjadi kerangka utama. Melalui pengembangan potensi ekonomi desa dapat menggali nilai pendapatan sumber daya alam yang ada di desa tersebut dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya. Untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya, maka pemerintah desa mendirikan badan

usaha milik desa (BUMDes) yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Jadi dengan dilakukannya Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka hal itu akan mendorong kesejahteraan masyarakat semakin meningkat ke arah yang lebih baik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Jane Richie (dalam buku Lexy Moleong 2017 : 6) menyatakan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Oleh karena itu metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data langsung ke lokasi di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penulisan Skripsi**

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																											
		Mar-21				Apr-21				Mei-21				Jun-21				Jul-21				Ags-21				Sep-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	ACC Judul		■																										
3	Persetujuan Pembimbing			■																									
4	Penyusunan Proposal				■																								
5	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																
6	Seminar Proposal												■																
7	Revisi Proposal													■															
8	Pengumpulan Data														■	■	■												
9	Pengolahan dan Analisis Data															■	■	■											
10	Bimbingan Skripsi																			■	■	■	■	■	■				
11	Pemeriksaan Buku																												■

### 3.3 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu pertama Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, kedua Informan Utama yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ketiga Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci ialah Kepala Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama ialah Pengurus BUMDes.
3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang ikut langsung dalam pelaksanaan BUMDes yaitu masyarakat.

### **3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang

atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi tiga yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tak berstruktur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

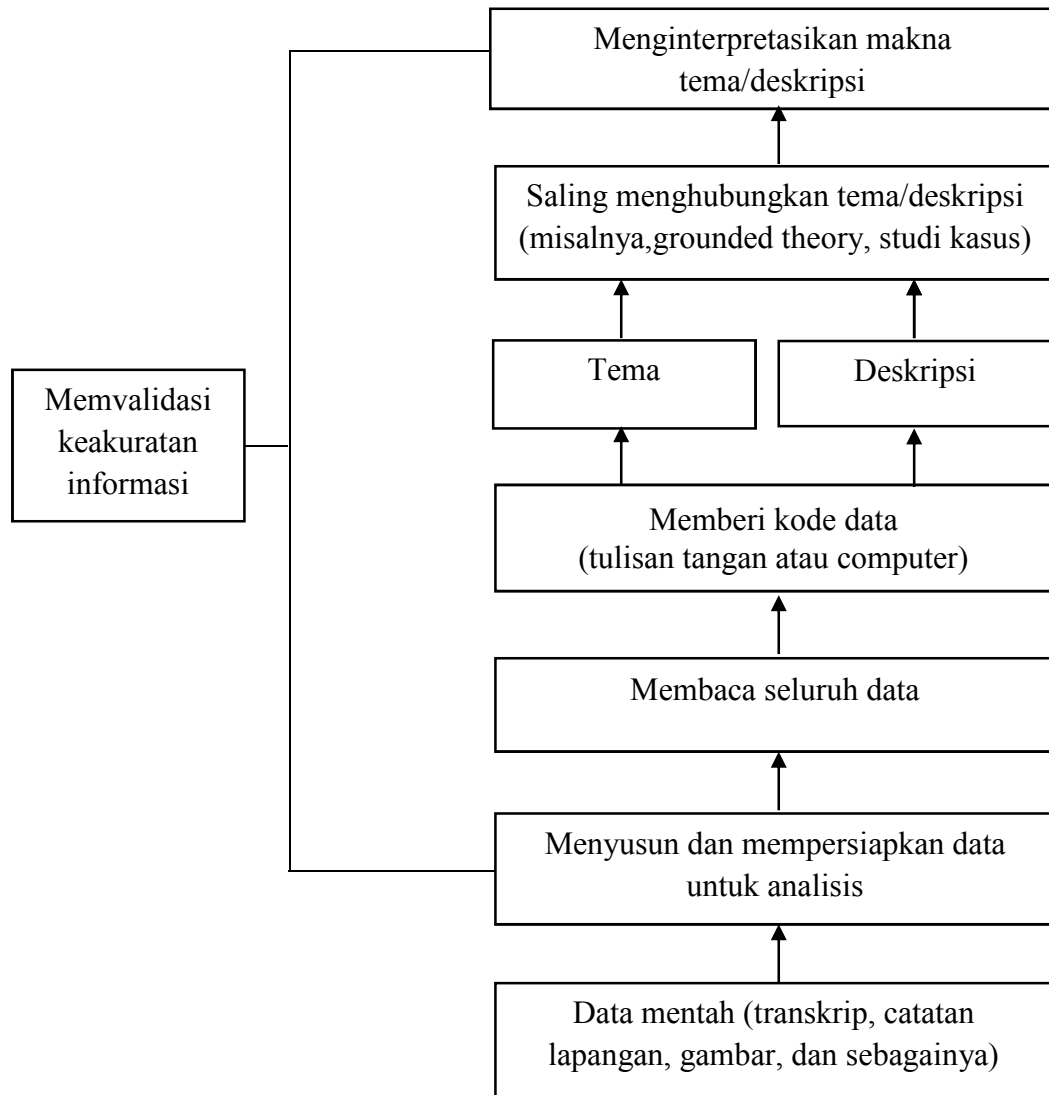
Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Creswel (2017 : 263) Langkah-langkah teknik analisis data :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.



- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.
- d. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.



Gambar 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penjelasan gambar di atas penyajian dimulai dari bawah ke atas. Dalam praktiknya pendekatan tersebut lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Dari data mentah dilakukan pengolahan data dan mempersiapkan data untuk dapat dianalisis ditempat penelitian yang melibatkan transkrip wawancara men-scanning

materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Setelah disusunnya dan mempersiapkan data maka harus diteliti kembali, agar tidak adanya kesalahan baik dalam penulisan dan juga dapat memberikan kode dari setiap data – data yang telah disusun agar dengan mudah dipahami kembali oleh peneliti.

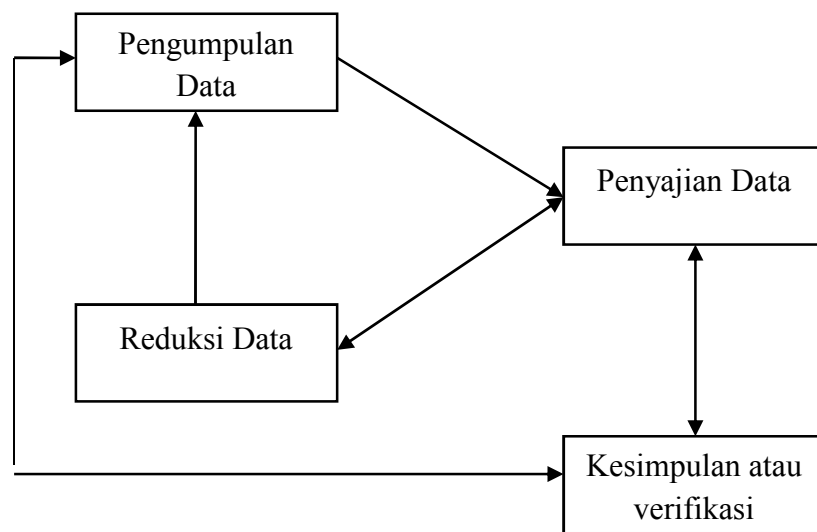
Setelah itu munculnya tema dari penelitian tersebut yang dapat mempermudah dalam mendeskripsikan dan pemaparan data yang saling berhubungan antara tema dan deskripsi teori – teori yang dipaparkan. Dan juga menginterpretasikan makna dari tema/deskripsi tersebut agar tidak adanya kekeliruan dalam pembuatan dan penyajian data dan setelahnya memvalidasi keakuratan informasi sehingga peneliti dapat mengambil makna dari setiap analisis data yang telah dilakukan.

### **3.6 Analisis Data**

Model analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dengan pengumpulan data berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan kemudian data tersebut dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Komponen dalam analisis data diantaranya yaitu :

1. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data ; *Penarikan Kesimpulan* yaitu hasil akhir dari penelitian yang kebenarannya dan keabsahannya telah memiliki kebenaran.



Gambar 3.6 Analisis Data

Dari gambar analisis data tersebut reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Tahap reduksi adalah dimana data informasi dari lapangan kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan

penelitian, atau sesuai tidaknya dengan pokok permasalahan. Data yang sudah direduksi tidak akan memberikan makna apa-apa atau tidak memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan penyajian data dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Pada penarikan kesimpulan dan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari informasi, data yang ada dan bukan penafsiran menurut pandangan peneliti. Dari analisis data diatas saling terkait dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri.

